

REFLEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUTAN
Studi Refleksi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kawasan Hutan di KPH
Padangan Kabupaten Bojonegoro

Suji

*Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
Jln. Kalimantan Kampus Tegalboto - Jember 68121
email: suji42@gmail.com*

ABSTRACT

*Forest management in the region of KPH (Forest Management Unit) Padangan Bojonegoro needs more maximum efforts through the empowerment of forest village communities. A good forest management will contribute to the forest itself and the surrounding communities. Therefore, this study is entitled **A REFLECTION OF FOREST VILLAGE COMMUNITY EMPOWERMENT**; A Reflective Study of the Implementation of Forest Village Community Empowerment Forest Area in KPH Padangan Bojonegoro. The research problems are formulated as follows: What are the forms of Community Empowerment in Forest Area of KPH Padangan? How well is the implementation of Community Empowerment in Forest Area of KPH Padangan?*

This study used qualitative approach, with the level of descriptive explanation, with the unit of analysis of Village Community of Forest Area in the Region of KPH Padangan in Bojonegoro. The data obtained were primary data and secondary data where primary data were obtained from interviews by structured questions and participatory observation technique. Meanwhile, the secondary data were obtained through review of documents. Data and information obtained were tested on their validity and reliability through the testing technique of data verification as what exists in qualitative research. Data verification was carried out through the participation of researchers, triangulation, examination and discussion, as well as member checking. Data analysis used interactive analysis model.

Based on these results, it was shown that the Joint Forest Management with Society held at in KPH Padangan Bojonegoro had been carried out through pattern of cooperation although more maximal efforts were still needed. By the formation of Forest Village Community Institution (LMDH) in KPH Padangan, rural community empowerment efforts could be undertaken. This is because LMDH, which is a forum for forest villager communities, has the right to carry out various co-operations on behalf of forest village community with PT. Perhutani (State Forestry Company) or related parties. The empowerment activities may include: Supervision, Sugar Cane Agribusiness, Intercropping Plant Production, Partnership and Community Development (PKBL), labor absorption, Nursery Production, Maintenance Cooperation of Terubusan, Cooperation on Bokhasi Fertilizer Making, Wood Sharing and Cooperation on Porang Plant.

The empowerment of forest surrounding communities in forest management should be done optimally by considering: the distribution of benefits of forest management that so far has been considered less fair for the community around the forest should be immediately improved. Forest management in the future would have to further involve communities in and around forest maximally, synergistically with adequate community assistance.

Keywords: Management, Empowerment, Community, Forest Area

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Degradasi hutan (di ikuti penurunan kualitas lingkungan) tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain akibat dari

pengolahan hutan yang tidak tepat, pembukaan hutan dalam skala besar untuk pembangunan di luar kehutanan, perambahan, penjarahan dan kebakaran. Degradasi hutan oleh perbuatan manusia

yang paling sulit untuk dikendalikan adalah penebangan liar (illegal logging). Akibat dari tindakan ini terancamnya kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistem, menurunnya kualitas lingkungan hidup serta berkurangnya penerimaan negara dari sektor kehutanan.

Terdapat sebuah asumsi bahwa; "manusia miskin justru akan terus memiskinkan lingkungannya". Bertitik tolak dari asumsi ini dapat diambil sebuah pemahaman bahwa, faktor rendahnya tingkat ekonomi masyarakat merupakan hal yang berpengaruh pada faktor rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap kelestarian alam (khususnya hutan). Disisi lainnya upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang telah dilaksanakan selama ini hasilnya ternyata kurang menggembirakan. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena kebijakan operasional masa lalu bersandar pada inisiatif pemerintah, berorientasi pada kegiatan tanam menanam, sehingga proses partisipatif kurang dipertimbangkan (Ditjen RLPS, 2003).

Sampai saat ini dalam pengelolaan hutan dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat sekitar hutan. Pada dasarnya masalah yang dihadapi di desa-desa dekat hutan tidak banyak berbeda dengan masalah di desa-desa lainnya di Indonesia, khususnya di Jawa dan Madura. Perum Perhutani (1995) mengemukakan beberapa permasalahan desa-desa yang berada di sekitar wilayah hutan adalah : kondisi lahan pertanian yang marginal; kurangnya lapangan pekerjaan dan terbatasnya keterampilan. Kondisi yang demikian tersebut menyebabkan rendahnya tingkat sosial ekonomi masyarakat dan mendorong masyarakat untuk ekspansi ke dalam hutan secara tidak bertanggung jawab dalam bentuk pencurian kayu. Sedangkan Hadi Pumomo (1985) mengemukakan permasalahan di daerah pedesaan yang berbatasan dengan hutan (dengan mengambil kasus di DAS Konto) sebagai berikut : (1) Tanah subur akan tetapi sangat peka terhadap erosi, (2) Topografi berbukit dengan lereng gunung yang curam dan curah hujan yang cukup tinggi, sehingga faktor penyebab erosi sangat tinggi. (3) Angka kepemilikan tanah sangat kecil. Sekalipun tanah subur tetapi belum mencukupi

kebutuhan hidup petani. Kehadiran hutan yang relatif luas menimbulkan kecenderungan untuk berekspansi ke dalam hutan secara ilegal dalam bentuk pencurian kayu dan hasil hutan lainnya.

Masalah yang selalu dihadapi Perum Perhutani dalam mengelola hutan di Pulau Jawa dan Madura antara lain kerusakan hutan yang disebabkan oleh pencurian kayu. Tingkat kerusakan hutan akibat pencurian kayu ini, disinyalir oleh Menteri Kehutanan akibat adanya kemiskinan masyarakat pedesaan di sekitar hutan. Sehingga untuk mengurangi tingkat kerusakan hutan harus diupayakan pengurangan kemiskinan. Nilai kerugian akibat pencurian kayu cukup besar, sebagai contoh yang terjadi di Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Bojonegoro menunjukkan tingkat kerugian pada tahun 1991 sebesar Rp. 101.179.000,- dan pada tahun 1995 meningkat menjadi Rp. 141.982.790,-

Menurut laporan PT Perhutani Unit II Jawa Timur, KPH Bojonegoro, luas hutan produksi kayu jati tinggal 26.160 hektar. hutan jati yang sudah tidak produktif 17.280 hektar. Kerugian yang dialami PT Perhutani akibat pencurian kayu meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, dari bulan Januari hingga Oktober 2001, Perhutani mengalami kerugian Rp 45,8 milyar atau setara dengan 69.629 batang pohon yang hilang. Kerugian ini diakibatkan masih maraknya penjarahan sejak tahun 1998. Namun demikian, PT Perhutani masih mendapatkan keuntungan cukup besar selama lima tahun terakhir dari produksinya. Misalnya, dari bulan Januari hingga November 2001, PT Perhutani membukukan laba Rp 41 milyar. Namun demikian, kontribusi terhadap kegiatan ekonomi daerah tahun 2000 cuma 2,8 persen dari total kegiatan ekonomi yang mencapai Rp 2,4 trilyun.

Hal ini, disebabkan antara lain adalah minimnya keterlibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan, sehingga *roso handarbeni (sense of belonging)* masyarakat sekitar hutan sangat kecil. Di samping itu sangat nampak sekali bahwa masyarakat sekitar hutan sangat tertinggal. Kemiskinan mendera mereka dan PT Perhutani, tidak memperhatikan fenomena tersebut sebagai satu hal sangat vital bagi kelestarian hutan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, Perum Perhutani melibatkan masyarakat di sekitar hutan secara aktif sebagai mitra kerja untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui kegiatan: tumpangsari; subsidi ternak dan pembinaan industri rumah tangga. Upaya yang dilakukan Perum Perhutani tersebut di kenal dengan istilah *Prosperity Approach* yang kemudian dikembangkan menjadi program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) pada tahun 1982. PMDH disini adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk dan berdampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah hutan dalam rangka keberhasilan pembangunan perhutanan. Program ini meliputi kegiatan di kawasan hutan dan di luar kawasan hutan berupa perbaikan biofisik pedesaan, peningkatan pendapatan, keterampilan dan pengetahuan masyarakat melalui berbagai penyuluhan dan pelatihan (Bratamihardja, 1990). Komponen PMDH terdiri dari program perhutanan sosial dan program bantuan teknis, ekonomi.

Sejalan dengan terjadinya pergeseran paradigma pembangunan ke arah demokratisasi ekonomi serta adanya krisis ekonomi, dilain pihak banyaknya jumlah penduduk miskin di kawasan hutan, telah menimbulkan kesan dan pergeseran penilaian masyarakat di sekitar hutan bahwa pengelolaan hutan bersifat *footlose industry* (tidak berdampak ekonomi pada wilayah disekitarnya). Akibatnya apabila tidak ada upaya-upaya mengantisipasinya, maka dalam jangka panjang menimbulkan permasalahan pokok yakni: kerusakan hutan; tingkat erosi yang cukup tinggi dan kemiskinan masyarakat di sekitar hutan. Atas dasar permasalahan tersebut, diperlukan kajian khusus untuk mencari model pembinaan masyarakat di sekitar hutan sehingga dapat memaksimalkan dalam memberdayakan masyarakat di kawasan hutan agar fungsi hutan akan lebih mempunyai *social benefit* bagi masyarakat dan pengembangan wilayah di kawasan hutan.

Beberapa kelemahan program Pembangunan Masyarakat Desa hutan (PMDH) yang dilaksanakan Perum Perhutani sebagai berikut:

- (1) Sistem agroforestry yang ada pada saat ini belum layak secara sosial ekonomi,
- (2) Bantuan sosial ekonomi yang dilaksanakan pada saat ini belum efektif menyentuh kelompok sasaran,
- (3) Dalam mengelola program PMDH, Perum Perhutani masih bekerja sendirian (*one man show*) belum dapat bekerja sama secara terintegrasi dengan lembaga (instansi sektoral) yang lain.
- (4) Usahatani tanaman pangan di kawasan hutan, dengan memperhitungkan secara perusahaan ternyata tidak efisien;
- (5) Penggunaan faktor-faktor produksi belum mencapai tingkat optimal;
- (6) Sistem pemasaran komoditas pangan belum efisien hal ini ditunjukkan dengan distribusi margin yang belum merata;
- (7) Informasi harga di tingkat konsumen belum ditransmisikan sepenuhnya kepada petani produsen.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang dikemukakan diatas, dalam usaha meningkatkan secara maksimal kegiatan pembinaan masyarakat di sekitar hutan, diperlukan suatu kegiatan penelitian dan percontohan yang berkelanjutan untuk menghasilkan hutan yang produktif, lestari serta mampu memberdayakan masyarakat di sekitar hutan.

1.2 Perumusan Masalah

Dari beberapa uraian tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

- 1.2.1 Apa bentuk-bentuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Hutan KPH Padangan ?
- 1.2.2 Bagaimana Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Hutan KPH Padangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan :

- a. Mengetahui bentuk-bentuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Hutan KPH Padangan.
- b. Mengetahui Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Hutan KPH Padangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Hutan.
- b. Secara khusus, penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap KPH Padangan dalam upaya pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan di lingkungan KPH Padangan.

2. KERANGKA KONSEPTUAL

2.1 Konsep Agroforestry

Model pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat hutan saat ini dikenal dengan Konsep Agroforestry. Berbagai definisi agroforestry telah banyak dikemukakan antara lain: King dan Chandler (1978) mengartikan agroforestry sebagai pola pengolahan lahan yang dapat mempertahankan dan bahkan menaikkan produktivitas lahan secara keseluruhan, yang merupakan campuran kegiatan kehutanan, pertanian, peternakan dan perikanan baik secara bersamaan maupun berurutan, dengan mempergunakan i-nanagemen praktis yang disesuaikan dengan pola budaya penduduk setempat. Achlil (1981) mengemukakan bahwa agroforestry suatu bentuk usahatani dalam rangka pengelolaan hutan serbaguna yang menyerasikan antara kepentingan produksi dan kepentingan pelestarian, berupa pengusahaan secara bersama atau secara berurutan jenis-jenis tanaman pertanian atau lapangan penggembalaan dengan jenis-jenis tanaman kehutanan pada suatu lahan hutan. Selanjutnya Soemarwoto, et al (1979) mendefinisikan agroforestry sebagai suatu sistem tata guna lahan yang permanen dimana tanaman semusim maupun tahunan ditanam bersama atau dalam rotasi membentuk suatu tajuk yang berlapis-lapis. Jadi secara keseluruhan agroforestry adalah suatu sistem penggunaan lahan yang merupakan perpaduan kegiatan kehutanan, pertanian, peternakan dan atau perikanan, kearah usahatani terpadu sehingga tercapai optimalisasi dan diversifikasi penggunaan lahan. Pengembangan sistem agroforestry diharapkan dapat memecahkan masalah penggunaan lahan sehingga kebutuhan

manusia yang beraneka ragam seperti pangan; sandang; kayu dan lingkungan hidup yang sehat dapat terpenuhi.

Menurut Ombo Satjapradja (1981) manfaat sistem agroforestry adalah : Pertama, dalam bentuk agroforestry didapat tanaman yang tidak homogen dan tidak seumur yang terdiri dari dua strata atau lebih. Dengan bentuk pola tanam demikian, tajuk tegakan dapat menutup tanah, terhindar dari erosi dan produktivitas tanah dapat dipertahankan. Kedua, para petani yang berimukim di sekitar hutan dapat mengolah lahan dengan tanaman palawija dan hijauan makanan ternak disamping menanam komoditi utama (pohon) kehutanan. Dengan demikian sistem agroforestry dapat memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan. Ketiga, dengan melaksanakan sistem agroforestry, akan didapat bentuk hutan serbaguna atau usahatani terpadu di luar kawasan kawasan hutan yang dapat memenuhi kebutuhan majemuk seperti kayu pertukangan; bahan pangan; madu, obat-obatan, hijauan makanan ternak dan lingkungan hidup yang sehat serta kebutuhan lain yang mendesak dari penduduk. Dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas lahan.

2.2 Konsep Agribisnis

Dalam rangka mendukung keberhasilan agroforestry tersebut, maka dalam pengelolaannya haruslah didasarkan pada pendekatan Agribisnis. Menurut Cramer dan Jensen (1994) agribisnis adalah seluruh kegiatan yang menyangkut aspek pendistribusian aspek input produksi, kegiatan usahatani, penyimpanan, pengolahan dan pendistribusian sampai pada konsumen akhir dari produk-produk pertanian. Menurut Mustadjab (1995), dalam konsep pembangunan ekonomi, agribisnis meliputi empat sub sektor. Pertama : Sub sektor agribisnis hulu (up stream agribusiness) yaitu kegiatan industri dan perdagangan yang menghasilkan sarana produksi pertanian primer seperti bibit, pupuk, pestisida dan alat-alat pertanian. Kedua : Sub sektor usahatani (on farm agribusiness) yakni kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi pertanian primer untuk menghasilkan komoditas

pertanian primer. Ketiga : Sub sektor agribisnis hilir (down-stream agribusiness) yakni kegiatan ekonomi mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk olahan beserta perdagangan dan distribusinya. Keempat : Sub sektor jasa penunjang kegiatan pertanian (agro supporting institutions) yakni kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis seperti perbankan, penelitian dan pengembangan, transportasi dan sebagainya.

Sistem agribisnis merupakan kegiatan yang kompleks yang dimulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai produk-produk yang dihasilkan oleh suatu usahatani atau agribisnis yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam agribisnis terdapat sub sistem yang terdiri dari: (a) Sistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi, teknologi dan pengembangan sumberdaya pertanian, (b) Sub sistem produksi pertanian atau usahatani, (c) Sub sistem pengolahan hasil-hasil pertanian atau agribisnis dan (d) Sub sistem pemasaran hasil-hasil pertanian.

Penyediaan dan penyaluran sarana produksi mencakup semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pengolahan, pengadaan dan penyaluran sarana produksi untuk memperlancar penerapan teknologi dalam usahatani dan memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal. Teknologi yang dimaksud adalah teknik-teknik bercocok tanam, penggunaan bibit baru yang lebih baik, penggunaan pupuk dan pestisida. Untuk mendorong terciptanya sistem agribisnis yang dinamis, khususnya yang menunjang terlaksananya usahatani yang baik dan menjamin pemasaran hasil pertanian serta pengolahan hasil pertanian diperlukan jasa dari pemerintah dan kelembagaan seperti jasa transporters, jasa keuangan, jasa penyaluran dan perdagangan serta jasa penyuluhan. Sektor jasa akan menghubungkan aktivitas subsistem yang terkait dalam agribisnis.

2.3 Konsep pengembangan Usaha off Farm dan Pembangunan Pedesaan

Apabila konsep agroforestry diterima sebagai sistem pengelolaan hutan, maka perlu dirumuskan kebijaksanaan dasar pengelolaan hutan yang dapat menunjang keberhasilan konsep tersebut. Agus

Pakpahan dan Erwidodo (1981) mengemukakan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kebijaksanaan sistem perhutanan adalah: (1) Pola pengusahaan hutan perlu dikaitkan dengan pola pengembangan wilayah terutama dengan industri dan pasar, (2) Tujuan pengusahaan hutan yang berasaskan hasil yang maksimum dan lestari perlu diperluas dengan memasukkan suatu prinsip maksimisasi kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, (3) Tujuan pengusahaan hutan perlu memasukkan asas maksimisasi lingkungan hidup.

Secara teoritis pembangunan masyarakat pedesaan di sekitar hutan, merupakan subsistem dari pembangunan desa. Mosher dalam bukunya *Thinking About Rural Development* (1976) mengemukakan bahwa kegiatan esensial yang harus ditangani yaitu: (1) Program yang berkaitan dengan pertanian meliputi : (a) penyediaan pasar untuk memasarkan hasil produksi pertanian, (b) penyediaan fasilitas pelayanan kebutuhan sarana produksi pertanian, (c) penyediaan fasilitas kredit pertanian, (d) pengadaan percobaan-percobaan lokal (verification Trials), (e) pengadaan jalan, untuk fasilitas transport dari wilayah usahatani; (2) Program yang berkaitan dengan kegiatan di luar sektor pertanian, meliputi : (a) pengembangan industri pedesaan, (b) penyediaan fasilitas kesehatan, (c) pelayanan masalah Keluarga Berencana, (d) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, (e) penyediaan fasilitas kegiatan keagamaan, (f) kegiatan penyuluhan tentang keluarga sejahtera, (g) penyediaan fasilitas yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat umum.

Pada umumnya pembangunan pertanian dipandang sebagai tujuan utama dari perkembangan kehidupan pedesaan, setidak-tidaknya dilihat dalam kerangka nasional. Pembangunan pertanian pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan posisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Faktor-faktor terpenting yang pengaruhnya menentukan dalam realisasi tujuan di atas adalah (Schoorl, 1980): (1) perbandingan manusia dan tanah, (2) kepadatan dan pertambahan penduduk, (3) perkembangan industri dan urbanisasi, (4) sistem kebudayaan, (5) struktur sosial, (6) struktur

Agraria, (7) penggunaan metode dan teknik baru, (8) adanya fasilitas informasi dan komunikasi yang baik, (9) faktor infrastruktur pertanian yang baik.

2.4 Keterkaitan Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Hutan Dan Lingkungan

Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan merupakan tanggung jawab semua pihak. Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan hutan diharapkan dapat lebih menunjang pengusahaan hutan secara lestari. Kelestarian hutan tanpa mengabaikan fungsi hutan sebagai fungsi produksi, fungsi sosial, serta fungsi ekologi atau lingkungan adalah harapan pengusahaan hutan. Konflik sosial yang marak akhir-akhir ini telah berdampak antara lain pada beredarnya kayu-kayu ilegal di pasaran. Apabila hal ini tidak segera diatasi, dikhawatirkan kerusakan hutan akan semakin parah.

Kerusakan hutan akan menimbulkan bencana lainnya, seperti bencana banjir dan menurunnya kuantitas dan kualitas air. Kerusakan hutan Indonesia yang merupakan paru-paru dunia akan menjadi isu lingkungan di dunia yang semakin memojokkan bangsa Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif. Menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pertimbangan bahwa penelitian ini peneliti bermaksud ingin mendeskripsikan atau memperoleh gambaran tentang *Refleksi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Hutan KPH Padangan*. Metode kualitatif menurut Moleong (2007:4) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan menurut Sugiyono (2005:1) dijelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih

menekankan pada makna daripada generalisasi.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis. Hal ini disebabkan dalam pendekatan kualitatif pada penelitian ini mempunyai ciri-ciri antara lain memiliki setting yang aktual, peneliti merupakan instrumen kunci, data biasanya bersifat deskriptif, menekankan pada proses, analisis datanya bersifat induktif, *meaning* (pemaknaan) tiap *even* adalah merupakan perhatian yang esensial dalam penelitian kualitatif (Bodan dan Biklen, 1992). Disebut fenomenologis karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan peristiwa sosial, disamping karena dapat mengungkapkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian nyata/riil, juga dapat mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi, lebih peka terhadap informasi-informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan obyek yang diteliti.

Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu. Fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang yang sedang diteliti oleh mereka. *Inkuiri* fenomenologis dimulai dengan diam. Diam merupakan tindakan untuk menangkap pengertian sesuatu yang sedang diteliti (Moleong, 2007:17). Dalam hal ini lebih menekankan aspek subjektif dari perilaku orang dan berusaha masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memahami peristiwa-peristiwa dan kaitan-kaitannya dengan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Hutan KPH Padangan.

3.2 Sumber dan Jenis Data

3.2.1 Sumber data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan-tindakan, bisa juga berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lofland dan Lofland dalam Moleong, 2007:157). Selain itu

sumber data adalah informan, kegiatan yang bisa diamati dan dokumen. Dimana informan menurut Miles dan Huberman (1992) bisa dibedakan pelaku utama dan bukan pelaku utama. Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Informan kunci (*key informan*), yaitu informan awal dipilih secara purposive. Hal ini dimaksudkan untuk memilih informan yang benar-benar relevan dan kompeten dengan masalah penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk membangun teori. Sedangkan informan selanjutnya diminta kepada informan awal untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi yang relevan, kemudian informan ini diminta pula untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi, dan seterusnya sampai menunjukkan kejenuhan informasi. Artinya bila menambah informan hanya memperoleh informasi yang sama, berarti informan sudah cukup dan informan ini sebagai informan terakhir. Cara seperti ini dipilih secara bergilir sampai menunjukkan tingkat kejenuhan informasi. Dalam penelitian ini yang dipilih menjadi informan kunci adalah orang/informan yang dianggap mengetahui dan paham Pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan KPH Padangan. Tempat dan peristiwa, yaitu berbagai peristiwa atau kejadian dan situasi sosial yang berkaitan dengan masalah atau fokus penelitian yang akan diobservasi.
- b. Dokumen, sebagai sumber lainnya yang bersifat melengkapi data utama yang relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian ini. Data ini digunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan pengamatan terhadap tempat dan peristiwa.

3.2.2 Jenis Data

Sebagaimana ditegaskan oleh Moleong (2007:157) bahwa jenis data dalam

penelitian kualitatif dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Data-data tersebut dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai informasi yang diperlukan. Data-data berupa keterangan berupa kata-kata dari informan penelitian yang diwawancarai dan tindakan yang diamati, dalam penelitian kualitatif adalah data utama (*primer*).

3.3 Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif meliputi tiga kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2007) menyebutkan bahwa dalam rangka pengumpulan data terdapat tiga kegiatan, yaitu : Proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*), saat berada di lokasi penelitian (*getting on*) dan tahap pengumpulan data (*logging the data*).

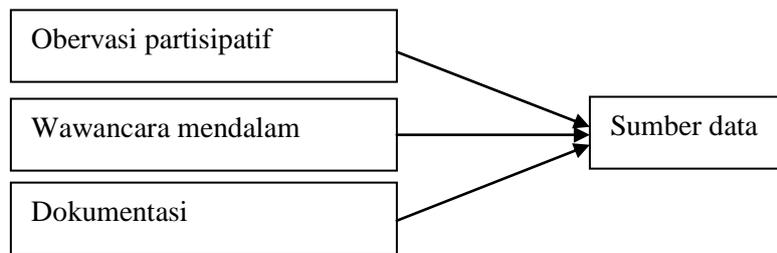
3.3.1 Proses Memasuki Lokasi Penelitian (*getting in*)

Peneliti pada tahap ini, memasuki lokasi penelitian dengan membawa ijin formal sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar akan mengadakan penelitian di lokasi penelitian yaitu Kantor KPH Padangan Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya peneliti memperkenalkan diri pada pimpinan KPH Padangan sebagai upaya peneliti untuk dapat berbaur dan melebur diri dengan latar penelitian secara baik. Disamping untuk beradaptasi dengan informan yang dilandasi oleh hubungan etik dan simpatik sehingga dapat mengurangi jarak sosial antara peneliti dengan informan.

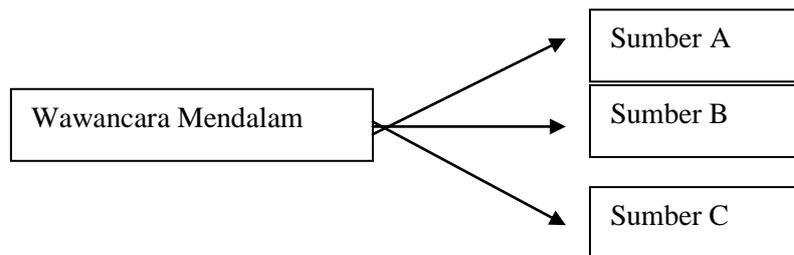
3.3.2 Saat berada di lokasi penelitian (*getting on*)

Pada saat peneliti berada di lokasi penelitian, peneliti berusaha menjalin hubungan secara pribadi yang lebih akrab dengan subjek penelitian, mencari informasi yang diperlukan secara lengkap dan berusaha menangkap makna dari informasi dan pengamatan yang diperoleh.

3.4 Pengumpulan Data (*logging the data*).



Gambar 1. Teknik pengumpulan data dengan cara yang berbeda-beda terhadap sumber data yang sama (triangulasi)



Gambar 2. Teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data (triangulasi sumber data)

3.5 Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, maka selanjutnya akan dianalisis untuk menemukan pola. Dengan cara melakukan pengujian sistematis untuk menentukan bagian-bagian, hubungan antar kajian, dan hubungan terhadap keseluruhannya. Untuk dapat menemukan pola tersebut peneliti melakukan penelusuran melalui catatan-catatan lapangan, hasil wawancara dan bahan-bahan yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal untuk kemudian disajikan apa yang telah ditemukan. Menurut Bogdan dan Biklen, Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (dalam Moleong, 2007:248).

Dalam proses analisis data ini dilakukan oleh peneliti secara terus-menerus, bersamaan dengan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dilakukan. Setelah peneliti memasuki objek penelitian yang berupa situasi sosial yang terdiri dari tempat

(*place*), orang (*actor*), dan kegiatan (*activity*), kemudian melaksanakan observasi partisipan, mencatat hasil observasi dan wawancara dan untuk selanjutnya peneliti melakukan analisis domein, analisis taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema kultural dan melakukan reduksi data untuk kemudian disajikan dalam rangka memperoleh kesimpulan/verifikasi.

3.6 Analisis Data Selama di Lapangan

Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis data selama di lapangan sebagaimana model Spradly, yaitu:

a. Analisis Domein

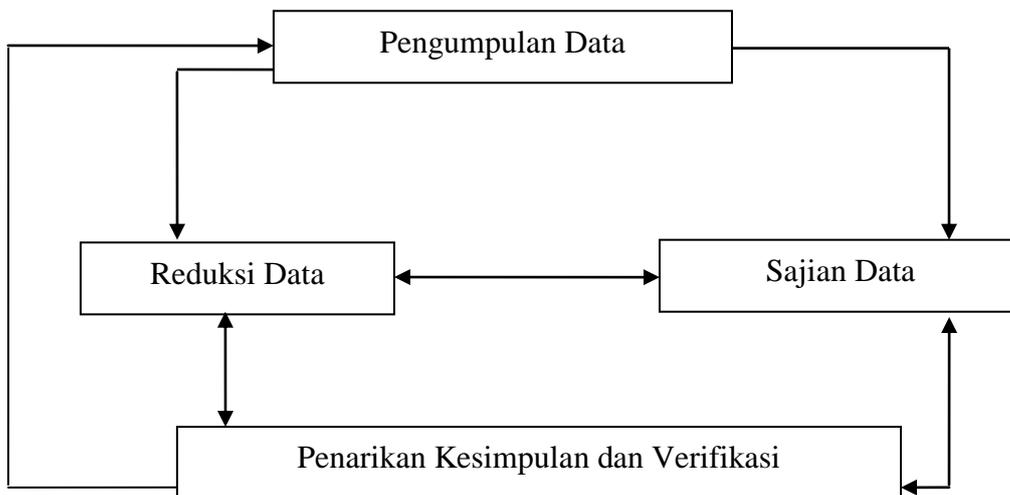
Dengan analisis domein maka akan diperoleh gambaran umum dan menyeluruh dari objek penelitian atau situasi sosial yang diamati. Data diperoleh dari *Grand Tour* dan *minitour question* (Sugiyono, 2005:10). Setelah menemukan domein-domein atau kategori-kategori dari situasi sosial yang diteliti menentukan domein tertentu sebagai pijakan dalam penelitian selanjutnya.

- b. Analisis Taksonomi
 Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domein yang telah ditetapkan, dimana domein tersebut dijadikan *cover term* oleh peneliti untuk dijelaskan lebih rinci dan mendalam. Pengumpulan data dilakukan secara terus menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumentasi sehingga data yang terkumpul cukup banyak maka diperlukan analisis taksonomi.
- c. Analisis Komponensial
 Analisis Komponensial dilakukan untuk mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen. Dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengkontraskan (*contras question*). Dalam analisis

komponensial yang dicari untuk diorganisasikan dalam domein bukanlah keserupaan dalam domein, tetapi justru memiliki perbedaan.

- d. Analisis Tema Kultural
 Analisis tema merupakan seperangkat prosedur untuk memahami secara holistik pandangan yang sedang diteliti. Sebab setiap kebudayaan terintegrasi dalam beberapa jenis pola yang lebih luas. Analisis tema sesungguhnya sebagai upaya untuk menemukan benang merah yang mengintegrasikan lintas domein, taksonomi dan komponensial sehingga dapat tersusun suatu pola yang sebelumnya masih remang-remang.

Dalam menganalisa data penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994:12) dengan model interaktif sebagai berikut :



Gambar 3. Model analisa Interaktif
 Sumber: Miles dan Huberman (1994:12)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data
 Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data-data yang relevan dengan aspek yang diteliti. Dengan sejumlah data dari obyek penelitian yang terkumpul akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisa data.
- b. Reduksi Data

Dalam tahap ini data dipilah-pilah dan disederhanakan, di mana data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam menampilkan, menyajikan dan menarik kesimpulan sementara.

- c. Penyajian Data
 Data-data yang telah dipilah-pilah dan disederhanakan tersebut berdasarkan kelompok data serta disusun dengan kategori yang sejenis untuk

disajikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara yang diperoleh pada saat data-data direduksi.

d. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Proses ini adalah merupakan tahap akhir setelah penyajian data-data hasil reduksi yang telah dilakukan sebelumnya. Setiap kesimpulan selalu dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan/ verifikasi merupakan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Luas Wilayah Hutan Bojonegoro

Dari aspek penggunaan tanah di kabupaten Bojonegoro, luas wilayah hutan negara menempati urutan pertama selanjutnya tanah sawah, tanah kering (tegalan), perkebunan dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1. Perbandingan luas lahan hutan negara dengan luas lahan pertanian

| No | Uraian | Luas (%) | |
|--------|--------------|----------|-------|
| | | Ha | % |
| 1 | Tanah sawah | 74.179 | 33,45 |
| 2 | Tanah kering | 49.115 | 22,15 |
| 3 | Hutan Negara | 88.371 | 39,85 |
| 4 | Perkebunan | 581 | 0,26 |
| 5 | Lain-lain | 9.490 | 4,28 |
| Jumlah | | 221.736 | 100 |

Sumber : Bojonegoro dalam angka 2007

Dengan melihat data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan, dari 221.736 ha luas wilayah Kabupaten Bojonegoro 39,85 % merupakan hutan negara yaitu 88.371 ha. Sedangkan 33,45 % dipergunakan sebagai lahan sawah yaitu seluas 74.179 ha, 22,15 % atau seluas 49.115 ha merupakan tanah kering dan hanya 0,26% sebagai lahan perkebunan, sedangkan sisanya 4,28 % diperuntukkan lain-lain. Dari sini dapat kita lihat bahwa lahan pertanian hanya sekitar 55,60 % yaitu seluas 123.924 ha, ini berarti setiap rumah tangga hanya memiliki rata seluas 0,38 ha.

Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan tanah setiap rumah tangga rata sangat kecil, sehingga sangat sulit bagi warga masyarakat petani kabupaten Bojonegoro untuk bangkit dari kemiskinan. Sementara di pihak lain PT. Perhutani menguasai hampir 40 % luas wilayah Bojonegoro, Oleh karena itu masyarakat sekitar hutan perlu dilibatkan secara optimal bagi pengelolaan hutan dari berbagai aspek.

Pada sisi lain hutan di Bojenegoro mengalami proses kemerosotan kualitas, yang tentu saja mencemaskan para pengelola maupun pengamat pengelolaan hutan di Bojonegoro. Proses tersebut berakar dari jumlah penduduk dikhawatirkan melampaui daya dukung wilayah dari waktu ke waktu di mana kepadatan penduduk di Bojonegoro mulai melintasi titik keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan minimum lahan pertanian yang dibutuhkan keluarga petani, sebagaimana nampak dalam table di atas. Hal ini berarti apa yang oleh Clifford Geertz (1963) dinamakan involusi pertanian (agricultural involution) sudah berakhir karena kemampuan lahan sawah untuk menampung tambahan tenaga kerja baru ada batasnya. Batas tersebut dicapai setelah luas lahan pertanian yang tersedia sudah lebih kecil dibandingkan dengan luas kebutuhan minimum setelah teknologi tidak lagi dapat meningkatkan produktivitas lahan

Konsekuensi logis yang timbul akibat pertambahan penduduk di Bojonegoro ditinjau dari aspek pengelolaan hutan meningkatnya jumlah penduduk di Bojonegoro menyebabkan perubahan dalam beberapa hal, yaitu :

- a. Konsumsi pangan meningkat
- b. Rata-rata luas pemilikan lahan pertanian perkeluarga petani menurun
- c. Jumlah angkatan kerja meningkat
- d. Jumlah kebutuhan kayu bakar meningkat
- e. Jumlah kebutuhan kayu pertukangan meningkat

4.2 Pelaksanaan Pemberdayaan

Masyarakat Di Kawasan Hutan KPH Padangan

Sesuai dengan paradigma baru PT. Perhutani yaitu Yakni pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat dan

pengelolaan berbasis ekosistem, maka PT. Perhutani telah menyempurnakan system pengelolaan hutan yaitu system pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT. Perhutani bersama masyarakat desa hutan atau dengan pihak lain yang berkepentingan, dengan cara berbagi. Sehingga kepentingan bersama untuk mencapai fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat terwujud secara optimal dan proporsional melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

SISTEM PHBM merupakan langkah baru yang dikembangkan Perhutani. Menurut Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan Perhutani Bambang Adji Sutjahjo, PHBM ini meninggalkan pola lama yang tidak efektif dan produktif. Pada pola lama, masyarakat itu dipandang sebagai musuh kehutanan. Dampaknya masyarakat memandang hutan itu milik Perhutani sehingga tidak merasa ikut memiliki. Tidak ada rasa bela saat hutan dijarah. Bahkan, lama-lama ikut menjarah. Sekarang diubah total di mana hutan itu dikelola bersama-sama Perhutani dan masyarakat dengan dasar menguntungkan kedua belah pihak secara optimal. Berbeda dengan sistem magersari di masa lalu. Dalam magersari, masyarakat boleh menggarap lahan hutan untuk ditanami tanaman pangan seperti padi, jagung, singkong. Tetapi, di sela-sela tanaman itu harus menanam jati dengan jarak yang rapat. Waktunya dibatasi sampai dua tahun saja. Sekarang tidak ada pembatasan waktu. Jarak tumpang sari juga diperenggang sampai 300 persen. Dalam sistem PHBM ini, pertanian bukan cuma bersifat subsisten, yaitu hanya untuk dipakai petani sendiri seperti masa lalu, melainkan diarahkan bersifat komersial. Menurut Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan Perhutani Bambang Adji Sutjahjo "Kalau dulu petani menanam singkong hanya dibuat gaplek untuk dimakan sendiri. Sekarang kita undang investor pabrik tepung tapioka untuk membeli hasil produksi tersebut,"

Sistem PHBM, di samping kerja sama Perhutani dengan swasta dalam menggarap lahan bekas jarahan, merupakan alternatif untuk memperbaiki struktur keuangan

Perhutani. Tidak bisa lagi Perhutani hanya mengandalkan produksi kayu, kondisi keuangan Perhutani kini cenderung bergerak ke arah yang tidak sehat. Pertambahan jumlah pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Bahkan, kalau tidak ada upaya penguatan, bukan mustahil suatu saat Perhutani tidak bisa membayar karyawannya. Penerapan PHBM tampaknya masih memerlukan perbaikan secara intensif.

Kegiatan PHBM dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumber daya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara proporsional. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat. Meningkatkan peran dan tanggung jawab PT. PERHUTANI (Persero), masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan. Meningkatkan mutu sumber daya hutan, produktivitas dan keamanan hutan. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan Negara.

Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya masyarakat desa hutan membentuk sebuah lembaga masyarakat yang disebut Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang anggotanya adalah masyarakat yang berdomisili di dalam wilayah desa hutan. Lembaga inilah yang nantinya mewakili masyarakat Desa hutan dalam proses kerjasama dengan PT. PERHUTANI (Persero) dan Pihak yang berkepentingan.

4.2.1 Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

Di lingkungan KPH Padangan Kabupaten Bojonegoro dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa hutan telah membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Di bawah ini disajikan perkembangan jumlah LMDH dalam 3 (tiga) tahun terakhir, sebagai berikut:

Tabel 2. Perkembangan pembentukan LMDH di KPH Padangan tahun 2005-2007

| No. | Tahun | Jumlah Desa Hutan | Jumlah LMDH | Persen |
|-----|-------|-------------------|-------------|--------|
| 1. | 2005 | 38 | 20 | 52,63 |
| 2. | 2006 | 38 | 29 | 76,32 |
| 3. | 2007 | 38 | 36 | 94,74 |

Sumber : KPH Padangan

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa Langkah awal untuk memberdayakan masyarakat kawasan hutan terutama di pangkuan KPH Padangan telah dilakukan secara konsisten. Dalam perkembangan tiga tahun terakhir KPH Padangan pada tahun 2005 telah berhasil membentuk LMDH sejumlah 20 LMDH atau sebesar 52,63 % dari 38 desa hutan dalam pangkuan KPH Padangan, sedangkan pada tahun 2006 meningkat menjadi 29 LMDH dan pada tahun 2007 LMDH yang telah dapat dibentuk sebanyak 36 LMDH atau sebesar 94,74 % desa hutan telah terbentuk LMDH, yang dapat mengatasmasyarakat desa hutan dalam bekerjasama baik dengan PT. Perhutani maupun pihak lain yang berkepentingan.

Hal ini menunjukkan bahwa KPH padangan serius dalam upaya memberdayakan masyarakat desa hutan dengan membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan hampir di semua desa sekitar kawasan hutan. Hanya 2 (dua) desa sekitar hutan yang belum terbentuk LMDH atau sebesar 5,26 % saja. Tetapi keseriusan ini harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah kongkrit untuk benar-benar berupaya mengangkat harkat dan martabat masyarakat kawasan hutan yang selama ini tertinggal (*marginal*)

4.2.2 Pendampingan

Dalam rangka memberdayakan masyarakat di kawasan hutan KPH

Tabel 3. Kerjasama LMDH Dalam Agribisnis Tanaman Tebu Dengan Pihak Lain

| No. | Nama LMDH | Masa Tanam | Luas Lahan (Ha) | Pihak lain |
|-----|----------------------------|------------|-----------------|--------------------|
| 1. | Jati Arum Ds. Nganti | 2002-2006 | 115,9 | CV. Dua Jaya |
| 2. | Sekar Gading Ds. Gading | 2005-2009 | 179,2 | CV. Dua Jaya |
| 3. | Sido Makmur Ds. Donan | 2005-2009 | 48,1 | UD. Sumber Pangan |
| 4. | Jati Mulyo Ds. Ngeper | 2006-2010 | 105,1 | PG Sedhono |
| 5. | Wono Sidodadi Ds. Gamongan | 2006-2010 | 48,7 | CV. Alfi Jaya |
| 6. | Rimba Mahanur Ds. Kendung | 2006-2010 | 7,8 | UD. Sandang Pangan |

Sumber : KPH Padangan

Padangan telah dilakukan dengan menggandeng sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bintara dari Yogyakarta. Kegiatan pendampingan dilakukan terhadap LMDH dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak KPH Padangan atas nama PT Perum Perhutani. Kegiatan pendampingan tersebut antara lain dalam kegiatan :

- Pembuatan Tanaman Hutan Pola MR III pada petak 108 K dengan luas lahan 69,5 hektar di RPH Besali BKPH Kates dengan LMDH Jati Murni Desa Meduri.
- Pengembangan petak 15 A seluas 51,8 hektar di RPH Tegaron BKPH Tegaron dengan LMDH Wono Sidodadi Desa Gamongan.
- Pemeliharaan Terubusan pada petak 20 B seluas 84,4 hektar di RPH Besali BKPH Kates dengan LMDH Jati Murni Desa Meduri.

4.2.3 Agribisnis Tanaman Tebu

Kerjasama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di KPH Padangan dengan pihak lain dilakukan dalam bentuk kerjasama agribisnis tanaman tebu. Kerjasama ini dilakukan oleh hanya beberapa LMDH saja, karena tidak semua lahan hutan dapat ditanami tanaman tebu. LMDH di KPH Padangan, yang melakukan kerjasama dalam agribisnis tanaman tebu, antara lain nampak dalam tabel sebagai berikut

4.2.4 Pembuatan Tanaman Tumpangsari

Tumpangsari adalah sistim pembuatan tanaman hutan yang dikembangkan bersama-sama dengan penanaman tanaman pertanian berdasarkan ketentuan teknis yang berlaku di Perhutani. Dari kegiatan tumpangsari tersebut Perhutani telah memberikan kontribusi cukup besar dari hasil panen tanaman pertanian. Dengan demikian Perhutani telah membantu masyarakat desa sekitar hutan dalam penyediaan pangan.

Sedangkan Kerjasama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di KPH Padangan dengan PT. Perhutani di wilayah

KPH Padangan dalam bentuk kerjasama pembuatan tanaman tumpangsari juga dilakukan. Kerjasama ini dilakukan oleh hanya beberapa LMDH saja, karena tidak semua lahan hutan dapat ditanami tanaman tumpangsari, karena kondisi tanah yang tandus. Berdasarkan data yang ada, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di KPH Padangan, yang melakukan kerjasama dalam pembuatan tanaman tumpangsari, secara umum dapat dikatakan sangat membantu petani. Dimana kontribusinya nampak dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Kontribusi Hasil Panen Padi & Polowijo

x Rp. 1.000

| Jenis | Tahun | | | | | |
|---------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | |
| | Ton | Rupiah | Ton | Rupiah | Ton | Rupiah |
| Padi | 1.323 | 1.163.098 | 3.262 | 3.914.400 | 3.827 | 3.828.218 |
| Jagung | 1.851 | 1.003.235 | 4.893 | 2.935.800 | 4.803 | 4.803.861 |
| Kacang | 0,153 | 24.480 | 1,655 | 33.100 | 1.069 | 1.077.309 |
| Ketela | | | 140 | 73.900 | 2.467 | 874.842 |
| Jumlah | 3.174 | 2.190.813 | 8.297 | 6.957.200 | 8.172 | 10.584.230 |

Sumber : KPH Padangan

Dengan melihat data tersebut, memperlihatkan bahwa lahan PT. Perhutani telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa hutan di KPH Padangan. Di mana, pada tahun 2004 hanya menghasilkan 3.174 ton hasil tanaman padi dan polowijo atau senilai Rp. 2.190.813.000,-. Sedangkan pada tahun 2005 meningkat tajam menjadi 8.297 ton hasil pertanian padi dan polowijo dari tumpangsari atau senilai Rp. 6.957.200.000,-. Pada tahun 2006 hasil tumpangsari padi dan polowijo menurun menjadi 8.172 ton, tetapi jumlah rupiah justru meningkat menjadi Rp. 10.584.230.000,-. Hal ini disebabkan karena harga hasil pertanian meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4.2.5. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Sejak tahun 1992 Perum Perhutani mengadakan bantuan pinjaman lunak kepada mitra binaan guna menumbuh kembangkan

perekonomian masyarakat desa hutan. Realisasi pinjaman dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2006 sebesar **Rp. 846.000.000,-** dengan jumlah mitra binaan sebanyak 120 mitra.

Hal ini sangat membantu masyarakat desa hutan dalam melakukan berbagai kegiatan usaha, baik usaha pertanian maupun usaha peracangan yang dapat dibiayai dari dana pinjaman dengan bunga terjangkau, yang sebelumnya para petani banyak melakukan pinjaman dengan bunga harian yang sangat tinggi.

4.2.6 Penyerapan tenaga kerja

Dalam kegiatan pengelolaan hutan tahun 2006 di KPH Padangan banyak menyerap tenaga kerja kasar sebesar 7.918 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.

| No | Kegiatan | Jumlah (orang) |
|--------|--------------------|----------------|
| 1. | Persemaian | 115 |
| 2. | Tanaman | 6.918 |
| 3. | Pemeliharaan Hutan | 186 |
| 4. | Tebangan | 164 |
| Jumlah | | 7.978 |

Sumber: data KPH Padangan tahun 2006

Hal ini, menunjukkan bahwa PT. Perhutani khususnya di wilayah KPH Padangan telah mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 7.918 tenaga kerja pada saat menyempitnya lapangan pekerjaan. Sehingga dari aspek lapangan pekerjaan PT. Perhutani cukup membantu dalam memberikan nilai tambah dan memberikan pekerjaan bagi warga sekitar kawasan hutan

saat krisis ekonomi belum ada tanda-tanda berakhir dan semakin bertambahnya tingkat pengangguran.

4.2.7 Pembuatan Persemaian

Kerjasama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di KPH Padangan dengan pihak PT Perhutani KPH Padangan dilakukan dalam bentuk kerjasama pembuatan persemaian. Kerjasama ini dilakukan oleh hanya beberapa LMDH saja, karena tidak semua lahan hutan melakukan pembuatan persemaian. Lembaga Masyarakat Desa Hutan di KPH Padangan, yang melakukan kerjasama dalam pembuatan persemaian, antara lain nampak dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6. Kegiatan Pembuatan Persemaian

| No. | Nama LMDH | Lokasi | Luas Lahan (Ha) |
|-----|----------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1. | Wono Rahayu ds Jawik | Petak 41B RPH Jawik | 4,5 |
| 2. | Madya Wana Lestari ds Malingmati | Petak 130C RPH Malingmati | 7,0 |

Sumber: data KPH Padangan tahun 2006

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebenarnya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) telah mampu membuat persemaian. Oleh karena itu, kebutuhan bibit tanaman jati maupun yang lainnya untuk pemenuhan kebutuhan bibit seharusnya dapat dipenuhi dengan memberdayakan LMDH yang ada di wilayah KPH Padangan.

4.2. 8 Kerjasama Pemeliharaan Terubusan

Kerjasama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di KPH Padangan dengan pihak PT Perhutani KPH Padangan dilakukan dalam bentuk kerjasama Pemeliharaan Terubusan. Pertumbuhan terubusan tunas jati yang baik dalam waktu 15 – 20 tahun sudah dapat dilakukan penebangan (panen).

Dengan demikian bagi hasil pemeliharaan yang dilakukan dalam Kerjasama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di KPH Padangan dengan pihak PT Perhutani KPH Padangan ini, pihak LMDH dapat bagi hasil 100% hasil pemeliharaan.

4.2.9 Kerjasama Pembuatan Pupuk Bokhasi

Kerjasama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di KPH Padangan dengan pihak PT Perhutani KPH Padangan juga dilakukan dalam bentuk kerjasama pembuatan pupuk bokhasi. Kerjasama ini dilakukan oleh hanya beberapa LMDH saja, karena tidak semua LMDH mempunyai kemampuan pembuatan membuat pupuk bokhasi. Lembaga Masyarakat Desa Hutan di KPH Padangan, yang melakukan kerjasama dalam pembuatan pupuk bokhasi hanya dilakukakan oleh 2 (dua) LMDH, yaitu :

- a. LMDH Wono Rahayu desa Jawik dengan total produksi 100 ton.
- b. LMDH Tunas Harapan desa Kunitan dengan total produksi 50 ton.

Produksi bokhasi dari hasil kerjasama dari 2 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di KPH Padangan dengan pihak PT Perhutani KPH Padangan tersebut dipergunakan atau dibeli oleh pihak KPH Padangan yang dipergunakan untuk pemupukan penanaman jati disekitar LMD tersebut. Dengan demikian pemenuhan pupuk bokhasi dapat dilakukan sendiri oleh LMDH setempat.

4.2.9 Sharing Kayu

Dalam hal pengamanan kayu tegakan di KPH Padangan juga dilakukan dengan melibatkan LMDH. Kerjasama ini terutama dilakukan oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Madya Wana Lestari desa Maling mati pada petak 9 RPH Kedung Poh BKPH Kaliaren Barat pada tahun 2004 dimana pihak LMDH mendapat Rp. 4.639.281,- (KPH Padangan).

Dengan melibatkan masyarakat desa hutan dalam melakukan pengamanan kayu tegakan sangat efektif. Berdasarkan data dari KPH Padangan selama dilakukan kerjasama pengamanan tegakan dalam petak 9 tersebut, kayu tegakan hanya berkurang kurang dari 10 % dari seluruh tegakan. Dengan demikian kerjasama ini dapat dikatakan berhasil, walaupun tidak sepenuhnya aman.

4.2.10 Kerjasama Tanaman Porang

Kerjasama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di KPH Padangan dengan pihak PT Perhutani KPH Padangan juga dilakukan dalam bentuk kerjasama tanaman porang. Kerjasama ini dilakukan oleh hanya beberapa LMDH saja, karena dana pengembangan tanaman porang masih terbatas. Lembaga Masyarakat Desa Hutan di KPH Padangan, yang melakukan kerjasama dalam kerjasama tanaman porang hanya dilakukakan oleh 2 (dua) LMDH yaitu :

- a. LMDH Wana Madya Lestari pada petak 67H RPH Jambaran dengan luas 3,9 ha.
- b. LMDH Sido Makmur Ds. Donan pada petak 21K BKPH Tobo.

Dalam kerjasama ini tidak mendapatkan hasil yang optimal karena kesulitan pemasaran hasil budidaya tanaman porang yang telah panen (pasca panen). Sehingga untuk selanjutnya para pesanggem enggan untuk melanjutkan penanaman porang tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kawasan Hutan wilayah KPH padangan telah melakukan berbagai bentuk kerjasama dengan LMDH

setempat. Bentuk-bentuk pemberdayaan tersebut antara lain :

- a. Pendampingan
 - b. Agribisnis Tanaman Tebu
 - c. Pembuatan Tanaman Tumpangsari
 - d. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
 - e. Penyerapan tenaga kerja
 - f. Pembuatan Persemaian
 - g. Kerjasama Pemeliharaan Terubusan
 - h. Kerjasama Pembuatan Pupuk Bokhasi
 - i. Sharing Kayu
 - j. Kerjasama Tanaman Porang
2. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di KPH Padangan dilaksanakan dengan membangun kerjasama sinergis antara masyarakat dan pemerintah dalam mengelola sumberdaya hutan. Dalam pola pengelolaan ini, masyarakat desa hutan tidak lagi merasa sebagai obyek dalam pengelolaan sumberdaya hutan. menuju Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, bagi kelestarian dan keberlanjutan fungsi hutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merekomendasikan sebagai berikut

1. Distribusi manfaat pengelolaan hutan yang selama ini dinilai kurang adil bagi masyarakat sekitar hutan harus segera dibenahi.
2. Sistem pengelolaan hutan pada masa yang akan datang kiranya harus lebih melibatkan masyarakat di dalam dan sekitar hutan secara maksimal.
3. Upaya pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan memerlukan sinkronisasi seluruh stakeholder yang meliputi pihak kehutanan, pemerintah, dan masyarakat, sehingga pemberdayaan masyarakat desa hutan dapat dilakukan secara sinergis dan optimal.
4. Pola pendampingan dalam proses kerjasama masih sangat diperlukan mengingat sumber daya manusia masyarakat desa hutan masih relatif rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achlil, M.R., 1981, *Beberapa Masalah dan Langkah Pembinaan dan Pengembangan Hutan Serbaguna*, BPH Distri dan UGM Yogyakarta
- Bratamihardja, 1990, *Agroforestry On Forest Land In Java*. Dalam : *Agroforestry an Technologies*. Biotrop Special Publication No. 39 : 14-146.
- Cramer, G.L and Jensen, C.W. 1994, *Agricultural Economics and Agribusiness*, Jhon Welly & Sons Inc. New York
- Cooler, Willem L, 1981, *Agriculture volution in Java dalam Agricultural and Rural Development in Indonesia*.
- Ditjen RLPS, 2003, Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, No: 141/kpts/2003, tentang *Pembentukan Sekretariat Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan*, Jakarta, 15 Desember 2003
- Geertz, Clifford, 1963, *Agricultural Involution*, University of California Press, Los Angeles.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan*.
- Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang *Pembentukan Kabinet Gotong Royong*;
- King, K.F.S. and Chandler, M.T., 1978 *The Waste Lands*. ICRAFT, Nairobi, 36 pp
- Manan, Syaifei, 1998, *Hutan, Rimbawan dan Masyarakat*, Institut Pertanian Bogor.
- Miles, M.B. dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, Cetakan 1, UI Press, Jakarta
- Moleong, Lexi, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mosher, Arthur T. 1976, *Thinking about rural development*, Agriculture Development Council Penerbit: New York
- Mustadjab, M.M. 1995. *Alokasi Sumber daya Pertanian dan Usaha Konservasi Tanah pada Usahatani Lahan Kering dengan Status Penguasaan Lahan yang berbeda*. Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang *Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan*.
- Pakpahan, A. dan E. Widodo, 1981, *Agroforestry sebagai suatu kebijakan Pengembangan Hutan di Wilayah yang Berpenduduk Padat (Tinjauan Aspek Agro ekonomi)*. Seminar Agroforestry dan Pengendalian Perladangan. Departemen Kehutanan RI, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang *Dana Reboisasi*;
- Purnomo, Hadi 1985. *Perkembangan Sistem Tanaman dalam Pembangunan Hutan Kembali di Lingkungan*, Seminar Pengalaman Dengan Agroforestry di Jawa, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

- Saputro, Hargo, 1990, *Historisitas Rimbawan Indonesia*, Panitia KKI II, Jakarta
- Satjapradja, Ombo, 1981, *Proceedings Seminar Agroforestry dan Pengendalian Perladangan*, Jakarta, 19-21 Nopember, 1981, Kerjasama Direktorat Reboasasi Rehabilitasi, Direktorat Jenderal Kehutanan dengan Balai Penelitian Hutan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian , Bogor
- Simon, Hasan, 1995, *Pembangunan Hutan Berwawasan Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat*, Pidato pengukuhan Guru Besar, UGM Jogjakarta.
- , 1993, *Hutan Jati dan Kemakmuran*, Aditya Media, Jogjakarta.
- Sourcebook-2nd ed. Library of Congress Cataloging in – Publication Data, 1994. *to Theory and Mithods*. Allton an Bacon Inc. Boston London, 1982.
- Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung,.
- Supardi, R. , 1974, *Hutan dan Kehutanan dalam Tiga Jaman*, Perum Perhutani, Jakarta.
- Wulffing, Wolf Von, 1932, *Opstandtafels voor Djatiplansoenen*, Lembaga Penelitian Bogor